

SAAT LIBUR NATAL DAN TAHUN BARU

Warga DKI Diperkirakan Serbu Hotel di Puncak dan Bandung

BOGOR (IM) - Warga Jakarta diperkirakan akan menyerbu tempat wisata di luar kota yang letaknya dekat dengan Ibu Kota pada libur tahun baru 2021. Warga Jakarta akan memilih menghabiskan liburan akhir tahun di Puncak, Bogor dan Bandung setelah pemerintah memangkas libur panjang dari 11 menjadi delapan hari.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Khriadi mengatakan warga Jakarta akan memilih menghabiskan liburan akhir tahun di Puncak, Bogor dan Bandung atau Anyer setelah pemerintah memangkas libur panjang dari 11 menjadi delapan hari.

"Kami perkirakan warga Ibu Kota akan tetap berlibur dan memenuhi hotel di sekitar Puncak, Bogor, dan Bandung," kata Khriadi saat dihubungi, kemarin.

Dengan mencukur libur panjang selama tiga hari pemerintah telah mengubah rencana warga yang ingin pulang kampung. Menurut dia, banyak warga yang mem-

batalan pulang kampung, tapi akan tetap memanfaatkan libur natal dan tahun baru untuk berlibur.

"Karena skema libur sekarang empat hari libur, tiga hari masuk dan libur lagi empat hari. Orang tetap akan liburan karena ingin mencari udara segar dan suasana baru," ujarnya. "Kawasan pantai di Banten juga akan menjadi tujuan warga Jakarta berlibur."

Dengan kondisi penularan Covid-19 yang masih tinggi di DKI, pengusaha hotel dan restoran di Ibu Kota tidak bisa berharap banyak menanggung untung seperti perayaan tahun baru sebelumnya.

Menurut dia, tingkat ketertarikan atau okupasi kamar hotel di Ibu Kota tidak bakal bisa tembus di atas 10 persen. Sebabnya Pemerintah DKI juga telah melarang industri menggelar perayaan tahun baru.

"Untuk okupasi sudah hancur lebur tinggal satu digit. Tidak akan lebih dari 10 persen," ucapnya. ● **pra**

Bupati Bogor Juga Larang Hotel dan Restoran Gelar Acara Malam Tahun Baru

CIBINONG (IM) - Bupati Bogor, Ade Yasin meminta masyarakat tidak merayakan malam tahun baru 2021 dengan membuat kegiatan yang menciptakan keramaian di masa pandemi Covid-19.

"Baiknya menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan, karena bisa menimbulkan kerumunan yang berujung semakin tidak terendalinya penyebaran Covid-19," kata Bupati Bogor di Cibinong, kemarin.

Ade Yasin menyarankan agar masyarakat mengisi malam pergantian tahun dengan berdiam diri di rumah untuk berkumpul bersama keluarga meski dalam kondisi libur panjang.

Bupati Bogor juga meningkatkan pelaku usaha pariwisata seperti hotel dan restoran agar tidak menggelar acara meriah dalam merayakan tahun baru.

Pemerintah Kabupaten

Bogor masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar praadaptasi kebiasaan baru (PSBB pra-AKB) yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 60 tahun 2020.

Dalam peraturan tersebut, jam operasional pusat keramaian seperti tempat belanja dan wisata dalam ruangan dibatasi hingga pukul 21.00.

Tempat pariwisata dengan wahana luar ruangan dibatasi hingga pukul 16.00.

Peraturan Bupati Bogor yang berlaku hingga tahun baru itu juga membatasi jumlah peserta setiap acara, maksimal 150 orang dengan durasi acara tiga jam.

"Kalau tempatnya besar tetap maksimalnya 150 orang dengan durasi acara tidak lebih dari tiga jam.

Aturan ini berlaku sampai tahun baru," kata Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor itu. ● **gio**



IDN/ANTARA

PEMBAU TAHU KENAKAN PAKAIAN FORMAL

Sejumlah pekerja yang mengenakan busana formal kemeja, jas dan berdasar seperti pekerja kantor memproduksi tahu di Sukaraja, Kabupaten Bogor, Senin (14/12). Ide ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa pekerja industri rumahan juga bisa bekerja dengan rapih dan bersih.

Pembangunan Alun-alun Cibinong Terhenti Akibat Pandemi

CIBINONG (IM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP), mengatakan, pembangunan alun-alun di Cibinong tertunda akibat pandemi Covid-19. Saat ini, pembangunan tahap pertama baru mencapai 89 persen.

"Namun pembangunannya terhenti karena Covid-19," ungkap Sekretaris DP-KPP Kabupaten Bogor, Irma Lestiana di Bogor, kemarin.

Menurutnya, pembangunan alun-alun yang berlokasi di Jalan Kayu Manis, Desa Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor terbagi dalam dua sesi.

Sesi pertama meliputi pembangunan dasar, seperti pembangunan gazebo, penataan lapangan, dan pembangunan jalan setapak.

Ia mengatakan, pembangunan tahap pertama melenai anggaran Rp 4,9 miliar yang bersumber dari bantuan Provinsi Jawa Barat.

Tapi semuanya terhenti

lantaran anggaran Provinsi Jawa Barat terkena refocusing akibat pandemi.

"Tahap pertama ini hanya sebagian kecilnya saja. Kalau untuk secara keseluruhan, pembangunan ada pada tahap dua nanti. Yang meliputi fasilitas penunjang," kata Irma.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara meminta kepada DPKPP Kabupaten Bogor untuk mengawal proses pembangunan tersebut.

Ia meminta agar DP-KPP Kabupaten Bogor terus menjalin komunikasi dengan Pemprov Jawa Barat untuk memastikan jika proyek ini benar-benar dilanjutkan pada tahun 2021.

"Tentunya kami tidak ingin proyek pembangunan ini berhenti begitu saja tanpa ada kejelasan.

Minimal, dari dinas harus mengawal ini dan berkomunikasi dengan Pemprov Jawa Barat untuk kepastian dan kelanjutan pembangunan ini," kata Sastra. ● **gio**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

SIMULASI PEMBUKAAN TK DENGAN PROTOKOL KESEHATAN

Seorang guru bersama murid melakukan simulasi pembukaan dan pembelajaran tatap muka Taman Kanak-kanak (TK) dengan protokol kesehatan di TK Negeri Pembina Cimahi, Jawa Barat, Senin (14/12). Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan berencana akan membuka kembali pembelajaran tatap muka bagi TK pada Januari 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Bima Arya Ingin Bogor Punya BUMD Seperti Jakpro

Jakpro dinilai sebagai BUMD yang mempunyai ruang gerak luas dalam menjalankan kebijakan strategis daerah, salah satunya pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS.

BOGOR (IM) - Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto punya harapan agar Bogor punya Badan Usaha Milik Daerah seperti Jakarta Propertindo atau Jakpro di Jakarta.

Jakpro dinilai sebagai BUMD yang mempunyai ruang gerak luas dalam menjalankan kebijakan strategis daerah, salah satunya pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS.

"Kami juga melihat BUMD harus dimaksimalkan terkait dengan program prioritas, seperti Jakpro kan ruang geraknya luas," kata Bima, di Bogor, Senin (14/12).

Menurut Bima, keberhasilan Jakpro menjalankan "Resettlement Action Plan" (RAP) atau memukimkan kembali

pada kegiatan strategis lewat pembangunan JIS di Jakarta Utara sesuai dengan kemampuannya sebagai BUMD yang didukung dengan alokasi anggaran memadai dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Banyak sekali yang bisa dikerjakan oleh Jakpro, mungkin daerah-daerah perlu memikirkan konsep-konsep BUMD seperti Jakpro," ujar Bima.

Bima menilai program program RAP kembali sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam menangani dampak sosial dari kegiatan pembangunan daerah maupun nasional.

Penerapan RAP mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang

Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

"Kita di Kota Bogor tidak pernah melakukan kegiatan pembangunan pemukiman dengan mengusir tanpa menyediakan alternatif atau pemukiman untuk warga, itu prinsip yang paling utama," kata doktor lulusan Monash University, Australia itu.

Bima menyebutkan, setiap langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor baik dalam penataan PKL maupun pembangunan permukiman dipastikan ada opsi-opsi untuk warga yang terdampak.

Program pembangunan "double track" milik pemerintah pusat yang ada di Kota Bogor juga memperhatikan dampak sosial bagi warga Kota Bogor.

"Ketika ada program 'double track' dari pusat kami minta pusat untuk memperhatikan, walaupun itu bukan program kami," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN)

tersebut.

Menyadari Kota Bogor belum memiliki proyek strategis daerah seperti yang dikerjakan oleh Jakpro, Bima mengapresiasi kemampuan Jakpro menjalankan RAP dengan memberikan ganti untung kepada 1.612 jiwa warga terdampak pembangunan JIS.

Menurut dia, keberhasilan menjalankan RAP adalah proses komunikasi dan sosialisasi kepada warga, karena tidak mudah itu meyakinkan warga untuk pindah.

Itu menyangkut persoalan sosial dan warga merasa sudah lama hidup dan tinggal di wilayah tersebut.

"Prinsipnya sama, tidak boleh mengusir, cuma perbedaannya di Jakarta anggarannya lebih besar, kemudian ada

program-program strategis, kalau di Bogor kan belum ada, di Jakarta kan sudah, wajar seperti itu, karena memungkinkan secara postur anggaran," kata Bima.

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tengah mengerjakan proyek strategis daerah yaitu membangun Jakarta International Stadium (JIS) senilai Rp4,08 triliun di Kelurahan Papunggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Pekerjaan itu dalam bentuk kerja sama operasional (KSO) bersama Wijaya Karya (Wika), Jaya Konstruksi dan PT Pembangunan Perumahan (PP).

Jakpro menerapkan "Resettlement Action Plan" (RAP) atau rencana aksi pemukiman kembali dalam pembangunan JIS. ● **gio**

KONTAK ERAT DENGAN SEKDA KOTA BOGOR

Bima Arya Jalani Tes Swab Covid-19

BOGOR (IM) - Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menjalani swab tes covid-19 usai masuk ke dalam daftar kontak erat dengan Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah yang terkonfirmasi positif.

"Sebagian sudah diswab hari ini, sebagian lagi ya bertahap kan ada banyak. Saya kurang tahu detailnya, saya juga diswab tadi pagi," kata Bima, di Makodim 0606/Kota Bogor, Senin (14/12).

Bima menambahkan, pihaknya masih terus melakukan proses tracing dengan maksimal dari kasus Syarifah. Pasalnya, orang nomor tiga di Kota Bogor itu banyak melakukan pertemuan-pertemuan.

"Bu Sekda kan positif (covid-19), Bu Sekda banyak lakukan rangkaian-rangkaian pertemuan kita akan lakukan tracing semaksimal mungkin,"

jelas Bima. Sementara, terkait aktivitas pemerintahan masih berjalan seperti biasa. Hanya saja, gedung Sekertariat Daerah (Setda) Kota Bogor ditutup sementara selama tiga hari guna proses sterilisasi.

"Kesekretariatan di sana dibersihkan dulu, kantor saya (Balaikota Bogor) tetap. Lingkungan Setda saja, gedung Setda 3 hari disterilisasi semua," tutupnya.

Seperti diketahui, Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah terkonfirmasi positif covid-19 hasil dari swab tes pada Minggu (13/12).

Belum diketahui pasti di mana dan kapan Syarifah bisa terpapar covid-19. Yang pasti, saat ini Syarifah tengah menjalani isolasi mandiri di rumahnya karena masuk dalam kategori orang tanpa gejala (OTG). ● **gio**

Kematian Tinggi, Kota Bandung Masih Zona Merah Covid-19

BANDUNG (IM) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung mengungkapkan level kewaspadaan penyebaran Covid-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Senin (14/12) masih berada di zona merah. Salah satu penyebab status tidak berubah adalah angka kematian akibat penyakit Covid-19 masih tinggi.

"Ini barusan dapat, masih zona merah dengan skor 1,65," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Rita Verita saat dikonfirmasi, Senin (14/12).

Menurutnya, angka kematian yang tinggi masih jadi penyebab status zona merah. Pusat data dan informasi Covid-19 Kota Bandung merilis jumlah kasus Covid-19 kumulatif mencapai 4.601 dengan kasus harian di angka puluhan.

Kasus aktif mencapai 920 kasus, kasus sembuh 3.545 dan kasus meninggal dunia 136 kasus.

Sebelumnya, Pemkot Bandung telah memberlaku-

kan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proposional pada awal Desember.

Menurutnya, aktivitas sektor usaha dan pariwisata yang telah direlaksasi dilakukan pembatasan kembali dari 50 persen menjadi 30 persen.

Wali Kota Bandung, Oded M Daniel mengatakan, Kota Bandung berada pada zona resiko tinggi atau merah penyebaran virus korona dengan skor 1,7.

Oleh karena itu, gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Bandung memutuskan untuk kembali memberlakukan PSBB proposional selama 2 pekan ke depan.

"Sekarang PSBB proposional," ujarnya di Balai Kota Bandung, Kamis (3/12).

Dia mengungkapkan, dalam PSBB proposional tidak akan diberlakukan pos cek poin di wilayah perbatasan.

Namun, sejumlah aturan terkait sektor usaha dan pariwisata yang mendapatkan relaksasi diubah. ● **pur**



IDN/ANTARA

SANKSI SOSIAL PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

Pelanggar menjalani sanksi sosial membersihkan pemakaman sesuai terjarang Operasi Yustisi Covid-19 di TPU Sompok Kesambi, Peterongan, Semarang, Jawa Tengah, Senin (14/12). Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Semarang secara rutin razia protokol kesehatan dengan pemberian sejumlah sanksi sosial serta tes diagnostik cepat kepada pelanggar dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19.